

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun populasi pengungsi di seluruh dunia terus mengalami peningkatan. Penyebabnya adalah adanya perlakuan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang mereka terima di negaranya seperti penganiayaan dan kejahatan perang.¹ Kondisi tersebut mendorong mereka meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan. Permasalahan baru muncul bagi para pengungsi yaitu penolakan oleh negara tujuan terhadap pengungsi tersebut. Alasan dari penolakan negara tujuan tersebut antara lain seperti negara yang merasa tidak bertanggung jawab dalam menerima pengungsi karena tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berada dibawah UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*), sebuah badan dibawah PBB yang bertanggung jawab terhadap pengungsi. Alasan lain adalah adanya ancaman terhadap stabilitas keamanan negara yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan ideologi serta resiko penyebaran konflik dari negara asal pengungsi.² Selain itu, negara kecil dan negara miskin menilai menerima pengungsi justru akan merugikan bagi negaranya karena kondisi geografis dan ekonomi negaranya yang dinilai tidak cukup memadai dalam menampung pengungsi.

¹ James C Simeon, *Introduction; The Research Workshop on Critical Issues in International Refugees Law and Strategies toward Interpretative Harmony* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

² Kompasiana "5 alasan penolakan bagi pengungsi Suriah"
<https://www.kompasiana.com/selasarcom/55f26c18779773ce07a1f99c/5-alasan-penolakan-bagi-pengungsi-suriah-irak?page=all> (diakses pada 3 Agustus 2018)

Penolakan inilah yang terjadi kepada pengungsi Suriah yang berupaya mendapatkan perlindungan akibat konflik yang terjadi di negaranya. Menurut UNHCR pada tahun 2015, Suriah merupakan negara dengan angka penyumbang pengungsi tertinggi di dunia.³ Sejak perang saudara meletus di Suriah pada 2011, terdapat sekitar 5,6 juta orang dari negara tersebut yang mengungsi untuk menyelamatkan diri dan mendapatkan perlindungan.⁴ Negara-negara di Benua Eropa dan Amerika menjadi tujuan kebanyakan para pengungsi tersebut. Namun tidak semua negara tujuan yang kemudian mau menerima para pengungsi tersebut.

Penolakan terhadap pengungsi asal Suriah oleh negara tujuan disebabkan mekanisme masuknya pengungsi ini tidak memiliki jaminan keamanan. Negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, Ceko, Rumania, dan Slovakia menganggap meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk merupakan ancaman bagi kedaulatan mereka karena tidak semua negara mampu menampung pengungsi Suriah tersebut.⁵ Meskipun dalam hal ini Uni Eropa telah memberlakukan kuota wajib bagi negara anggotanya untuk menerima pengungsi. Pemberlakuan kuota wajib dinilai hanya akan mendorong semakin banyaknya pengungsi menjadikan negara-negara Eropa sebagai tujuannya.⁶

³ *Press Release* UNHCR “UNHCR” www.unhcr.org/2015wrd-press-release (diakses 27 Agustus 2018)

⁴ UNHCR. “*Syria regional refugee response*” <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria> (diakses 4 Agustus 2018)

⁵ Denny Armandhanu “Polandia tolak pengungsi ” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160509233735-134-129574/polandia-membangkang-uni-eropa-tolak-terima-pengungsi> (diakses 27 Agustus 2018)

⁶ Rohmatin Bonasir “Dibalik penolakan imigran oleh eropa timur” https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150923_dunia_imigran_eropatimur (diakses 28 Agustus 2018)

Selain negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS) juga merupakan salah satu negara yang menolak masuknya pengungsi Suriah.⁷ AS dibawah Presiden Trump mengeluarkan kebijakan untuk menolak masuknya pengungsi Suriah tanpa batas waktu yang ditentukan ke AS.⁸ Kebijakan Trump ini merupakan respon terhadap serangan teror yang terjadi di Paris pada 13 November 2015 dimana salah satu dari tujuh pelaku yang tewas dalam serangan tersebut adalah warga Suriah yang masuk ke Eropa melalui Yunani dalam rombongan pengungsi.⁹ Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi teror yang sama di AS.

Berbeda dengan beberapa negara diatas yang menolak masuknya pengungsi Suriah ke negara mereka meskipun negara tersebut meratifikasi konvensi dan protokol tentang pengungsi, Kanada justru menyambut baik masuknya pengungsi Suriah. Keterlibatan Kanada dalam penanggulangan masalah pengungsi memang terus meningkat pasca meratifikasi konvensi dan protokol tentang pengungsi. Salah satunya adalah keberhasilan Kanada menampung sekitar 40.271 pengungsi Indocina pada tahun 1980.¹⁰ Namun, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Stephen Harper yang menjabat sejak tahun 2006-2015, peran Kanada dalam penanggulangan pengungsi dinilai tidak terlalu baik. Kebijakan mengenai pengungsi pada masa Harper mengalami kemunduran dengan dipersulitnya pengungsi untuk masuk ke Kanada. Hal ini karena adanya ketakutan dari Partai

⁷ Sian Troath, "Prospects for Australian-Led Regional Cooperation on Asylum Seeker and Refugee Issues". *Andalas Journal of International Studies*. Vol. 5 No. 2, November 2016, hal. 109.

⁸ *Anonymous* "Kebijakan larangan Trump" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40453147> (diakses 28 Agustus 2018)

⁹ *Anonymous* "Pasca serangan Paris AS tolak pengungsi Suriah" https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151117_dunia_amrik_pengungsisuriah (diakses 25 Agustus 2018)

¹⁰ *Canada's 2016 record high level of resettlement praised by UNHCR* <http://www.unhcr.org/news/press/2017/4/58fe15464/canadas-2016-record-high-level-resettlement-praised-unhcr.html> (diakses 5 September 2018)

Konservatif dalam isu keamanan ketika Kanada menampung terlalu banyak pengungsi.¹¹

Pada masa kampanye pemilihan umum Kanada tahun 2015, kasus pengungsi sedang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini disebabkan karena viralnya foto seorang anak laki-laki asal Suriah yaitu Alan Kurdi yang ditemukan meninggal di sebuah pantai di Turki. Diperkirakan bahwa Alan Kurdi dan keluarganya sedang berusaha menyeberang perairan melalui Turki untuk masuk ke Kanada.¹² Kasus ini kemudian menjadi isu yang hangat pada pemilihan umum Kanada. Bahkan dalam kasus ini, Kanada dinilai sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab karena muncul isu bahwa keluarga Alan Kurdi yang sedang berusaha masuk ke Kanada ditolak dengan alasan dokumen yang tidak lengkap.¹³ Masyarakat Kanada sendiri saat itu turut mengkhawatirkan persepsi dunia internasional terhadap Kanada. Tentang bagaimana Kanada belum cukup membantu pengungsi Suriah yang menjadi korban perang di negaranya.¹⁴ Hal ini tentu merusak reputasi Kanada sebagai negara yang terbuka dan ramah terhadap pengungsi.

Terpilihnya Trudeau sebagai Perdana Menteri baru Kanada pada akhir tahun 2015 membawa kebijakan baru yang lebih terbuka terhadap masuknya pengungsi

¹¹ Mudzakir Amdjad “Kanada yang sama” <https://www.merdeka.com/khas/kanada-yang-sama.html> (diakses 21 Agustus 2018)

¹² The Canadian Press “*Government says it never got refugee application from family of drowned Syrian boy*” <http://ottawacitizen.com/news/politics/relatives-of-dead-boys-assail-canada-for-inaction> (diakses 23 Agustus 2018)

¹³ Terry Glavin “Alan Kurdi drowned off the shores of Turkey. His family was trying to reach Canada, National Post” <http://news.nationalpost.com/news/canada/drowned-boys-family-sought-refuge-in-canada> diakses 10 Agustus 2018

¹⁴ Candice Malcolm, “*From Crisis to Response: Assessing Canada’s Fast-Track Refugee Policy*,” *Global Dispatch, Issue 1* (Maret 2016)

Suriah. Sikap Kanada yang kembali terbuka untuk menerima pengungsi di negaranya dinilai sebagai salah satu bentuk peran aktif Kanada sejak terlibat dalam rezim pengungsi dibawah UNHCR. Kanada sendiri telah menandatangani konvensi mengenai status pengungsi 1951 dan protokol pengungsi 1967 pada 4 Juni 1969.¹⁵ Hal ini diwujudkan dengan masuknya sekitar 39.000 pengungsi Suriah ke Kanada hingga awal Januari 2016.¹⁶ Kebijakan Trudeau yang pro-pengungsi ini sendiri merupakan wujud dari janjinya pada masa kampanye.¹⁷

Dibawah Trudeau, Kanada kemudian kembali menunjukkan diri sebagai negara yang ramah terhadap pengungsi. Trudeau menetapkan target untuk jumlah pengungsi yang masuk ke Kanada. Target tersebut akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dibuktikan dengan para pengungsi Suriah yang sudah mulai tiba di Kanada sejak November 2015 menggunakan pesawat komersil. Kanada sendiri memiliki target untuk menerima setidaknya 25.000 pengungsi hingga akhir Februari 2016.¹⁸ Target tersebut kemudian ditingkatkan menjadi dua kali lipat sampai akhir 2016. Jumlah pengungsi Suriah yang akan masuk ke Kanada akan terus meningkat sesuai dengan target pemerintah seperti pada 2017 dimana Kanada menargetkan sekitar 330.000 orang imigran untuk masuk ke Kanada.¹⁹

¹⁵ *States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*
<http://www.unhcr.org/id/> (diakses 28 Agustus 2018)

¹⁶ Marcheilla hanggoro “Jika di AS ditolak, Kanada justru terbuka pada pengungsi”
<https://www.merdeka.com/dunia/jika-di-as-ditolak-kanada-justru-terbuka-pada-pengungsi.html>
(diakses 25 agustus 2018)

¹⁷ Omair quadri “*Platform Comparison: where the parties stand on the top campaign issue*”
<http://www.theglobeandmail.com/news/politics/elections/party-platform-comparison/article26758784> (diakses 23 Agustus 2018)

¹⁸ *Anonymous* “Kanada sambut rombongan pengungsi Suriah”
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151211_dunia_kanada_pengungsi diakses 27 Agustus 2018

¹⁹ *Anonymous* “Kanada Siap Terima 330.000 Imigran Baru Tahun 2017”, <https://internasional.kompas.com/read/2016/11/01/11503051/kanada.siap.terima.330.000.imigran.baru.tahun.2017>. diakses 28 Agustus 2018

Kebijakan Kanada dalam meningkatkan penerimaan pengungsi Suriah tentu diiringi dengan meningkatnya anggaran yang dihabiskan. Kanada telah menghabiskan setidaknya 413 juta Dollar per tahun untuk 40.000 pengungsi yang telah masuk ke negara mereka antara tahun 2016 sampai 2017.²⁰ Jumlah ini tentu terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya pengungsi Suriah yang masuk ke Kanada. Termasuk biaya relokasi, tempat tinggal, kesehatan dan edukasi, rata-rata pengungsi Suriah ini akan membutuhkan dana setidaknya 4000 dolar per orang per tahun.²¹

Kebijakan Kanada menerima pengungsi Suriah ini bahkan mengabaikan ancaman terorisme yang justru menjadi ketakutan dari beberapa negara dalam menerima pengungsi asal Timur Tengah. Terlebih pasca terjadinya serangan di Paris dan San Bernardino yang melibatkan pengungsi Suriah.²² Ditambah dengan ancaman krisis pengungsi dan pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi negara. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, menjadi unik untuk melihat kebijakan Kanada yang justru menerima pengungsi Suriah ditengah penolakan dari berbagai negara pada masa PM Trudeau tersebut.

²⁰ Ali Taghva, “*Refugees Costing Canada \$413 Million Per Year*” (<https://www.thepostmillennial.com/refugees-costing-canada-413-million-per-year/>, diakses 28 September, 2018)

²¹ Jim Coyle, “*Weighing the costs and values of Canada’s Syrian refugee pledge*”, (<https://www.thestar.com/news/canada/2015/11/18/weighing-the-costs-and-values-of-canadas-syrian-refugee-pledge.html>, diakses 28 September, 2018)

²² Anonymous “*San Bernardino attack drawn into Republican calls to halt refugee intake*”, <https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/07/san-bernardino-shooting-republicans-syrian-refugees> diakses 5 September 2018

1.2 Rumusan Masalah

Berbanding terbalik dengan sikap beberapa negara seperti AS dan negara-negara di Eropa yang menolak pengungsi Suriah, Kanada justru sangat terbuka menerima pengungsi Suriah masuk ke negaranya. Masuknya pengungsi Suriah memberi konsekuensi seperti adanya ancaman keamanan terkait teroris, stabilitas ekonomi yang berkaitan dengan besarnya jumlah dana yang dibutuhkan untuk menampung pengungsi tersebut. Kebijakan Kanada dibawah PM Trudeau tersebut juga sangat berbanding terbalik dengan pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa Stephen Harper. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneliti kebijakan Kanada terkait penerimaan pengungsi Suriah dibawah PM Trudeau.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mengapa Kanada menerima pengungsi Suriah pada masa Perdana Menteri Justin Trudeau ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah pada masa Trudeau.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi wawasan serta pengetahuan akademis dalam kajian ilmu Hubungan Internasional mengenai isu penerimaan pengungsi khususnya yang dilakukan oleh Kanada.

2. Menjadi referensi literasi terhadap isu kepentingan nasional bagi penstudi ilmu Hubungan Internasional yang dapat dianalisis dan diteliti lebih lanjut bagi pihak yang tertarik dengan permasalahan ini.

1.6 Kajian Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, penulis berusaha untuk mencari acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Berikut adalah lima kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.

Kajian pustaka pertama adalah *Syrian Refugees in Canada: Interpretation and Judgement in the Political Production of Security Threats* oleh Jessica Singh.²³ Tulisan ini membahas tentang kebijakan penerimaan pengungsi Kanada dari aspek keamanan. Kondisi politik dan historis yang mempengaruhi kebijakan terhadap pengungsi di Kanada. Serta bagaimana keamanan sebagai aspek kedaulatan bekerja untuk mencapai tujuan sosial dan politik tertentu. Tulisan ini berkontribusi untuk melihat seberapa jauh ancaman keamanan yang diterima Kanada dalam menerima pengungsi Suriah.

Kajian pustaka kedua adalah artikel *Assessing Canada's Fast-Track Refugee Policy* yang ditulis oleh Candice Malcolm.²⁴ Artikel ini menjabarkan tentang kebijakan penerimaan pengungsi Suriah oleh Kanada pada masa Trudeau. Pada penelitian ini dijelaskan adanya kemungkinan masuknya teroris ke Kanada melalui

²³ Jessica Singh, "Syrian Refugees in Canada: Interpretation and Judgement in the Political Production of Security Threats," (Kanada, University of Victoria, 2014)

²⁴ Candice Malcolm, "From Crisis to Response: Assessing Canada's Fast-Track Refugee Policy," *Global Dispatch, Issue 1* (Maret 2016)

jalur pengungsi. Artikel ini juga menjelaskan tentang kebijakan Kanada yang menerima pengungsi untuk kemudian mendorong pengungsi tersebut melakukan integrasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kanada. Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian penulis untuk menjelaskan tentang adanya ancaman keamanan yang diabaikan oleh Kanada dalam menerima pengungsi.

Kajian pustaka ketiga yang digunakan adalah *Canada's Refugee Strategy: How It Can Be Improved* yang ditulis oleh Robert Vineberg.²⁵ Tulisan ini menjabarkan tentang bagaimana Kanada dapat mengembangkan strateginya dalam menangani masuknya pengungsi terkait permasalahan seperti pengungsi yang menyeberang secara ilegal ke Kanada atau bagaimana Kanada menanggulangi banyaknya pengungsi yang meninggal pada saat perjalanan menuju negara tujuan. Program seperti *In-Canada Refugee Claimants, Government Assisted Refugees (GARs), dan privately Sponsored Refugees (PSRs)* dinilai yang perlu ditingkatkan oleh Kanada dalam menerima pengungsi terkait jumlah pengungsi yang diterima, proses imigrasi bagi para pengungsi serta program pemberdayaan bagi pengungsi. Tulisan ini berkontribusi dalam melihat respon yang diperlukan Kanada untuk mencegah munculnya masalah atau resiko jangka panjang dan memaksimalkan potensi pengungsi bagi Kanada dalam kebijakan penerimaan pengungsi Kanada.

Kajian pustaka keempat adalah *The Economic Integration of Refugees in Canada* yang ditulis oleh Lori Wilkinson dan Joseph Garcea.²⁶ Tulisan ini menjelaskan tentang integrasi ekonomi yang sulit dicapai oleh pengungsi di

²⁵ Robert Vineberg, "Canada's Refugee Strategy: How It Can Be Improved," SPP Briefing Paper, volume 11:14 (April 2018)

²⁶ Lori Wilkinson dan Joseph Garcea, "The Economic Integration of Refugees in Canada," Migration Policy Institute, (April 2017)

Kanada. Keterbatasan bahasa dan tingkat pendidikan menjadikan pengungsi ini sulit mendapat pekerjaan yang layak dan upah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Kanada berupaya mendorong integrasi ekonomi tersebut melalui berbagai program bagi para pengungsi. Meskipun program pengungsi tersebut berjalan baik namun masih belum menunjukkan kesuksesan dimana tingkat integrasi ekonomi yang masih rendah. Tulisan ini berkontribusi untuk menjelaskan program bagi pengungsi yang dilakukan oleh Kanada untuk mendorong integrasi ekonomi di Kanada.

Kajian pustaka kelima adalah *Syrian refugee resettlement in Canada: An auto-ethnographic account of sponsorship* oleh Jona Zyfi.²⁷ Tulisan ini membahas tentang program pendanaan pengungsi oleh Kanada. Pendanaan yang dilakukan oleh Kanada terhadap pengungsi cukup signifikan dibanding beberapa negara lainnya. Penampungan dan pendanaan merupakan solusi bagi masalah pengungsi yang masuk ke Kanada sebagai bentuk dukungan dan perlindungan bagi pengungsi. Melalui pendanaan yang baik, Kanada mampu untuk terus meningkatkan jumlah pengungsi untuk ditampung di Kanada serta mengurangi tekanan bagi negara lain yang kesulitan dalam menerima pengungsi. Kontribusi artikel terhadap penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Kanada melakukan pendanaan dalam menampung pengungsi Suriah di Kanada.

1.7 Kerangka Konseptual

Kebijakan luar negeri menurut Walter Carlsnaes yaitu, tindakan-tindakan yang diarahkan pada tujuan, kondisi, aktor (pemerintah maupun non pemerintah)

²⁷ Jona Zyfi, "Syrian refugee resettlement in Canada: An auto-ethnographic account of sponsorship," Working paper series, (May 2016)

yang berada di luar wilayah teritorial yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah atau komunitas yang berdaulat.²⁸ Menurut Mark Amstutz, kebijakan luar negeri merupakan tindakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan nasionalnya yang melampaui batas wilayah negaranya.²⁹ Sedangkan menurut Modelski, kebijakan luar negeri adalah strategi digunakan pemerintah negara terkait tindakan dan hubungannya dengan negara lain maupun unit politik internasional lainnya dalam mencapai kepentingan nasional.³⁰ Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap pihak-pihak yang berada di luar teritorialnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Terkait kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah pada masa Trudeau sendiri, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Kanada dibawah Trudeau ditujukan terhadap pengungsi Suriah dalam upaya mencapai kepentingan nasional Kanada.

Memahami fenomena sosial dalam Hubungan Internasional diperlukan adanya konseptualisasi dalam penyederhanaan fenomena guna untuk membantu menganalisa dan memahami fenomena-fenomena yang ada dalam Hubungan Internasional.³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep Determinan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *“Introduction of International Politic”*.³²

²⁸ Walter Carlsnaes, *“Foreign Policy”*, *Handbook of International Relations*, Sage, hal 331-339

²⁹ Mark R. Amstutz, *“International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics”*. 4th Ed. Boulder: Rowman and Littlefield, 2013.

³⁰ George Modelski, *“A Theory of Foreign Policy”*, (Frederick A Praeger: Part Four, 1962), hal 100-152

³¹ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi* (Jakarta, PT Pustaka LP3ES,1994), 92

³² William D. Coplin, *Introductions do International Politics: A Theoretical Overview*, terj. Mercedes Marbun, Sinar Baru: Bandung, 2003. Hlm 165-174

Konsep ini akan menjelaskan proses pengambilan kebijakan luar negeri berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam terbentuknya kebijakan tersebut. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk atas pengaruh dari berbagai pertimbangan yang ada di dalamnya. Coplin menjelaskan terdapat empat determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri satu negara yaitu; konteks internasional, perilaku pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri.³³

1. Konteks Internasional

Konteks internasional akan menjelaskan tentang bagaimana negara berperilaku yang akan ditentukan oleh sistem internasional dan hubungan negara tersebut dengan kondisi yang ada dalam sistem internasional tersebut. Kondisi internasional merupakan seperangkat faktor yang mempengaruhi politik luar negeri satu negara. Dalam hal ini terdapat tiga elemen penting dari konteks internasional yang mempengaruhi politik luar negeri yaitu geografis, ekonomis, dan politis.

Geografis di masa lalu memainkan peran penting dalam politik luar negeri. Seperti bagaimana negara yang saling berdekatan menyatukan kekuatan dalam menghadapi ancaman atau justru satu negara akan memperluas wilayahnya ke negara terdekat. Pemikir realis seperti Morgenthau melihat geografis menjadi aspek penting oleh negara dalam menentukan kepentingan nasionalnya terkait aktivitas politik luar negerinya. Namun geografis dalam pemahaman lampau ini dianggap terlalu menekankan konteks internasional sebagai yang berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Saat ini, geografis masih memainkan peran

³³ William D. Coplin, *Introductions do International Politics: A Theoretical Overview*

penting dalam politik luar negeri namun tidak seperti yang dijelaskan oleh pemikir masa lalu. Geografis saat ini lebih kepada hubungan antar negara dalam kedekatan geografis seperti dalam perdagangan dan menjadi alasan utama dalam dibentuknya organisasi lintas negara dalam suatu kawasan.

Ekonomi merupakan bagian penting lainnya dalam konteks internasional. Aktivitas ekonomi melalui pertukaran barang dan jasa serta arus modal menunjukkan kekuatan ekonomi yang dimiliki satu negara dan seberapa jauh negara tersebut bergantung terhadap negara lain. Negara maju akan menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda dibanding negara terbelakang yang cenderung lebih bergantung kepada negara maju.

Hubungan politik antar negara memiliki pengaruh terhadap keputusan dalam kebijakan luar negeri satu negara. Aliansi yang terbentuk memiliki pengaruh tidak hanya bagi negara non-anggota namun juga anggotanya sendiri. Terdapat kondisi yang harus diperhitungkan dalam membuat keputusan terkait keterlibatan satu negara dalam aliansi. Selain itu, kemampuan dalam mendapatkan dukungan negara lain atas suatu kondisi juga akan mempengaruhi dibuatnya keputusan dalam kebijakan luar negeri dari negara tersebut.

Berdasarkan ketiga elemen tersebut, konteks internasional dalam perumusan kebijakan luar negeri akan mengikuti kondisi internasional saat ini. Dimana menurut Rosecrance, ketergantungan ekonomi antar negara akan mengurangi permusuhan antar negara, karena negara tersebut akan mengkhawatirkan kepentingan ekonominya.³⁴ Begitupun dengan adanya organisasi regional.

³⁴ Richard Rosecrance, *Rise of The Trading State* (New York, 1986)

Organisasi regional yang didasarkan pada geografis juga akan mengurangi kemungkinan perang atau penggunaan kekuatan militer antara negara yang bertetangga melalui kerja sama yang kuat.

2. Pengambil Keputusan

Perilaku politik suatu negara dianggap sebagai cerminan dari perilaku pemimpin terkait aktivitas politik luar negeri negara tersebut. Kepribadian dan perilaku individual dalam politik luar negeri dinilai mempengaruhi sikap pengambil keputusan dalam setiap keputusan yang dibuatnya. Namun, pengambil keputusan tidak dapat bergerak atas kemampuannya sendiri melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan tersebut adalah sistem internasional dan kondisi sosial dan politik dalam negerinya yang kemudian menjadi hambatan dan hal-hal yang membatasi aktivitas pengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai aktivitas politik yang dilakukan oleh pengambil keputusan, maka hal itu akan berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengambil keputusan dan bagaimana pengambil keputusan tersebut bereaksi atas hal itu. Namun, hal itu juga tidak berarti jika pemimpin yang kuat akan selalu menghasilkan sebuah kebijakan yang revolusioner bagi negaranya.

3. Politik Dalam Negeri

Dalam determinan ini, keputusan politik luar negeri suatu negara akan dipengaruhi oleh stabilitas sistem politik dari negara tersebut. Negara dengan sistem politik terbuka atau negara demokrasi akan cenderung untuk berargumentasi di publik tentang kebijakan dalam aktivitas politik luar negerinya. Sedangkan negara dengan sistem politik tertutup atau negara otokratis akan mencapai konsensus

secara individu. Tingkat stabilitas politik dalam negeri atau keterbukaan sistem politik negara tersebut akan mengarahkan politik luar negerinya pada aspek tertentu, namun faktor lain seperti konteks internasional dan pengambil keputusan juga akan bekerja di dalamnya.

Selain itu, masyarakat juga menjadi aspek yang mempengaruhi dalam perumusan kebijakan luar negeri terkait politik dalam negeri negara tersebut. Menurut Rosenau sumber ini mencakup budaya, sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik.³⁵ Budaya dan sejarah akan mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu. Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara termasuk harmoni dan konflik sosial didalamnya. Sedangkan opini publik adalah perubahan sentimen masyarakat atas suatu fenomena.

4. Kondisi Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Begitupun, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan ada peningkatan pada kekuatan militernya. Kemampuan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh suatu negara akan berperan penting terhadap penyusunan politik luar negerinya. Dimana pengambil keputusan akan mendapatkan tuntutan dan dukungan terkait kondisi ekonomi dan militer yang dimiliki negara tersebut. Dapat disimpulkan, negara dengan ekonomi dan militer yang baik akan lebih mampu

³⁵ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 18.

untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional yang ingin dicapainya dengan kapabilitas negara itu sendiri. Negara dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat akan cenderung lebih aktif dalam politik internasional.

Konsep Determinan Politik Luar Negeri, digunakan oleh penulis untuk menjelaskan kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah pada masa PM Trudeau. Keempat determinan yaitu, konteks internasional, pengambil keputusan, politik dalam negeri, serta ekonomi dan militer, digunakan untuk menjelaskan mengapa Kanada menerima pengungsi Suriah ditengah berbagai penolakan dari negara lain. Ancaman keamanan seperti penyebaran konflik dan terorisme diabaikan oleh Kanada dalam kebijakan ini. Determinan politik luar negeri oleh Coplin ini kelak akan berperan untuk menggambarkan tujuan spesifik Kanada dalam menerima pengungsi Suriah.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian ilmu Hubungan Internasional digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang sebuah fenomena hubungan internasional tersebut diperoleh. Selain itu, metode penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga nantinya akan didapatkan data dan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini mencoba menjelaskan kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah pada masa PM Trudeau. Penelitian eksplanatif ditujukan agar dapat menjelaskan masalah yang

diteliti dengan memahami hubungan sebab akibat secara cermat dan lengkap dengan menitikberatkan fokus pada hubungan antar variabel.³⁶ Hubungan kausalitas ‘sebab-akibat’ adalah hasil akhir dari penelitian jenis ini.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah pada masa Trudeau adalah 2015 sebagaimana tahun tersebut merupakan tahun terpilihnya Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada, sampai tahun 2018 dimana data terbaru dapat dijabarkan

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dideskripsikan.³⁷ Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan.³⁸ Tingkat analisis adalah hal yang menjadi landasan dalam keberlakuan suatu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, unit analisis dalam penelitian ini adalah Kanada. Sedangkan unit eksplanasinya adalah kebijakan penerimaan pengungsi Suriah oleh Kanada. Disamping itu yang menjadi tingkat analisisnya adalah negara, karena kebijakan penerimaan pengungsi suriah merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Kanada.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan berbasis internet yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan

³⁶ Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 9.

³⁷ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES, 1994), hal. 35.

³⁸ *Ibid*

dengan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun informasi yang telah dahulu dimuat di jurnal, surat kabar, buku, majalah dan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet.³⁹

Pada penelitian ini, data utama yang menjadi sumber adalah data yang terdapat dalam situs-situs resmi yang menyediakan informasi dengan kata kunci pengungsi Suriah, kebijakan Kanada, dan penolakan pengungsi. Seperti, data tentang jumlah pengungsi Suriah yang masuk ke Kanada dan penampungannya di Kanada. Data selanjutnya yang dibutuhkan adalah informasi mengenai kebijakan luar negeri Kanada terkait penerimaan pengungsi Suriah yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah Kanada. Informasi selanjutnya yang dibutuhkan adalah data tentang bantuan yang diberikan pemerintah Kanada terhadap pengungsi serta berbagai informasi lainnya yang kemudian dapat diakses melalui situs resmi lainnya terkait dengan kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah. Data yang akan dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, data resmi, berita, laporan serta pernyataan elit politik dan data lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, berita, hasil survei dan sumber lainnya terkait yang mempunyai validitas terkait penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan strategi analisis data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan

³⁹ Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 28.

kemudian dipilah sesuai kebutuhan dalam penelitian ini.⁴⁰ Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan memilih informasi dari data dan sumber relevan dengan isu yang dibahas serta mempunyai validitas dalam penerbitannya. Selanjutnya, data yang telah didapatkan akan dikategorikan ke dalam unit analisis dan unit ekspansi, lalu melakukan interpretasi informasi atas data yang ada dan menggambarkan pola yang muncul dari kategori yang ada. Kemudian melakukan analisis sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian ini.⁴¹

Untuk menganalisis data yang ada, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap, pertama, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan pengungsi Suriah hingga masuknya pengungsi Suriah ke Kanada. Selanjutnya pada tahap kedua, peneliti akan menjabarkan kebijakan luar negeri Kanada terkait dengan masuknya pengungsi Suriah ke Kanada. Kemudian pada tahap ketiga, peneliti mengelaborasi fakta-fakta dari data yang telah ditemukan dengan konsep determinan politik luar negeri oleh William D. Coplin yang telah dijelaskan pada kerangka konseptual. Melalui proses ini, akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

⁴⁰ Andrews, "Classic Grounded Theory to Analyze Secondary data: Reality and Reflection", *the grounded theory review* vol.11 no 1 (2012), hal 5.

⁴¹ John W.Cresswell, *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches*, (California, Sage Publication Inc, 2007) , 163

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dinamika Pengungsi Suriah

Bab ini menjelaskan tentang dinamika pengungsi Suriah mulai dari konflik Suriah yang menyebabkan munculnya pengungsi hingga penolakan pengungsi Suriah oleh berbagai negara.

BAB III: Kebijakan Luar Negeri Kanada terkait Pengungsi Suriah

Bab ini menjelaskan tentang kebijakan Kanada dalam menerima pengungsi Suriah pada masa PM Trudeau.

BAB IV: Analisis Penerimaan Pengungsi Suriah oleh Kanada

Bab ini berisi analisis penulis dalam melihat kebijakan Kanada menerima pengungsi Suriah pada masa PM Trudeau.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

